Identifikasi Potensi Pengembangan Konsep *Smart Village* Pada Desa Wisata Rende Kabupaten Bandung Barat

VANIA NADHIRA AFIFAH

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional Email: vnadhiraa14@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan wilayah Indonesia mengalami perubahan sejak masuk pada era revolusi industri 4.0 yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pembangunan antara kota dan pedesaan yang tidak merata menjadi alasan diperlukannya suatu reformasi dalam meningkatkan daya saing wilayah. Smart village merupakan suatu inovasi dalam memajukan perkembangan desa berbasis teknologi informasi. Konsep smart village di Indonesia digunakan pemerintah menyelesaikan sebagai solusi dalam permasalahan pedesaan beranekaragam. Penelitian ini membahas potensi pengembangan konsep smart village pada Desa Wisata Rende dengan menggunakan variabel smart government, smart community, dan smart environment sebagai inovasi pengembangan Desa Wisata Rende yang belum memenuhi indeks ketercapaian kelayakan pembentuk desa wisata. Hasil penelitian ini menunjukan Desa Rende memiliki potensi pengembangan variabel smart government 80%, smart community 50%, dan smart environment 50%. Arah pengembangan lanjutan berupa smart government dengan dilakukannya pengembangan dan penyediaan sistem informasi desa (online) guna meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Kata kunci: Smart Village, Desa Wisata, Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah di Indonesia mengalami perubahan sejak masuk era revolusi industri 4.0 yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mempermudah manusia memproduksi, mengolah data, menyebarkan seluruh informasi secara efektif dan efisien. Pembangunan infrastruktur berbasis teknologi informasi tidak hanya menyangkut hak atas akses informasi, tetapi juga memiliki kaitan yang erat dengan disparitas pembangunan yang belum dapat dinikmati secara merata oleh semua masyarakat. Pembangunan pedesaan saat ini menjadi fokus utama, karena masyarakat pedesaan tidak mendapat manfaat yang berarti dari adanya pembangunan di perkotaan (Pranadji dan Hastuti, 2004).

Smart village merupakan salah satu inovasi dalam memajukan perkembangan desa dengan berbasis teknologi informasi dalam mengatasi permasalahan pada kawasan rural. Konsep smart village di Indonesia digunakan oleh pemerintah sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan desa yang beranekaragam. Namun, penerapannya belum dilakukan secara maksimal dan masih ditemukannya *qap* antara kajian teoritis dengan implementasi karena

terkendala oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan desa (Subekti & Damayanti, 2019). Konsep *smart village* pada desa-desa di Indonesia memiliki tiga variabel pokok yaitu *smart government, smart community* dan *smart environment* yang menjadi landasan dalam mencapai tujuan pengembangan *smart village* berupa "*Smart Relationship*" (Herdiana, 2019).

Desa Rende merupakan salah satu dari kelima desa yang ditetapkan menjadi desa wisata pada tahun 2014 oleh Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. Namun, Desa Rende belum memenuhi aspek pembentuk desa wisata berdasarkan sisi fasilitas pendukung dan sosial masyarakat (Royyan, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan konsep *smart village* pada Desa Wisata Rende sebagai suatu inovasi pengembangan Desa Rende sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era industry 4.0. Terdapat 3 (tiga) variabel dalam penelitian ini yaitu *smart government, smart community* dan *smart environment*.

2. METODOLOGI

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan mengambarkan kondisi eksisting tanpa adanya manipulasi data.

2.2 Metode Pengumpulan Data

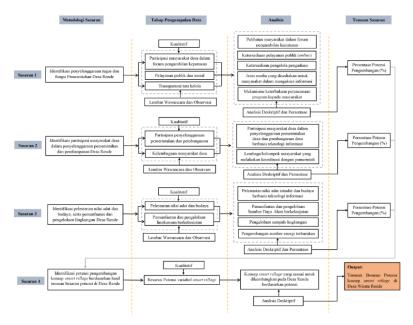
Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sumber data penelitian *non probability sampling* berupa *key person. Key person* digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga membutuhkan *key* person untuk melakukan wawancara atau observasi secara mendalam dan dapat berupa tokoh formal ataupun tokoh informal (Bungin, 2003). Pemilihan *key person* dilakukan dengan adanya pertimbangan informan yang dianggap dapat memberikan data dan informasi secara mendalam terkait pertanyaan yang peneliti ajukan dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisa potensi pengembangan konsep *smart village* pada Desa Wisata Rende. Kriteria pemilihan *key person* formal ini merujuk pada bidang yang bertanggung jawab dalam mengurusi bidang komunikasi, informatika, statistik, dan aplikasi informatika, serta informan yang paling mengetahui terkait kondisi pemerintahan desa, masyarakat dan lingkungan pada wilayah Desa Rende. Sesuai dengan kriteria tersebut maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Cikalong Wetan, dan Kepala Desa Rende.

Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa Kecamatan Cikalong Wetan dalam angka dan profil Desa Rende serta melakukan metode telaah dokumen, studi literatur, survei instansi dan penelusuran internet. Pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara dan observasi. Penyusunan form pertanyaan dan form *checklist* data disesuaikan dengan indikator dan parameter pada studi jurnal terpilih guna memperkecil lingkup jawaban, lalu diajukan kepada informan sesuai dengan kriteria penelitian.

2.4 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan kondisi eksisting Desa Rende yang tertuang dalam tiga analisis dan menghasilkan output akhir berupa persentase potensi pengembangan pada setiap variabel *smart village*. Persentase dihasilkan dari banyaknya jumlah ketercapaian parameter dibagi dengan total parameter pada masing-masing variabel. Hasil temuan besaran potensi pengembangan variabel *smart village*

akan digunakan sebagai pertimbangan dalam perumusan potensi konsep *smart village* yang akan dikembangkan di Desa Rende dan dengan merujuk pada studi literatur lain.



Gambar 1. Kerangka Analisis

3. IDENTIFIKASI POTENSI PENGEMBANGAN KONSEP *SMART VILLAGE* PADA DESA RENDE

Penelitian ini akan membahas empat sub analisis sesuai dengan sasaran penelitian.

3.1 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Rende

Smart government merupakan variabel smart village yang berfokus pada tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui smart government ini diharapkan tugas dan fungsi pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien dengan berbasis teknologi komunikasi informasi yang optimal. Berikut merupakan kondisi variabel smart government pada Desa Rende.

Tabel 1. Kondisi Smart Government di Desa Rende

No	Indikator	Parameter	Kondisi Eksisiting
1.	Partisipasi masyarakat dalam forum pengambilan keputusan	Pelibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan	Masyarakat Desa Rende dilibatkan dan berperan secara aktif dalam forum pengambilan keputusan (MusDus/MusDes/Musrenbangdes).
2.	Pelayanan publik dan sosial	Ketersediaan pelayanan publik (online)	 Pemanfaatan pelayanan publik (online) yang disediakan oleh pemerintah kabupaten belum dimanfaatkan secara maksimal karena Desa Rende hanya memanfaatkan 1 dari 14 pelayanan publik (online) yang disediakan yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pelayanan publik Desa Rende masih dilaksanakan secara manual dengan mendatangi kantor desa untuk melakukan administrasi. Desa Rende tidak memiliki situs web desa. Namun, memiliki media sosial Facebook (kurang up to date) dan Whatsapp Grup dengan pihak RT/ RW dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat.

No	Indikator	Parameter	Kondisi Eksisiting
		Ketersediaan pengelola pengaduan masyarakat	Desa Rende memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 11 orang yang bertanggung jawab dalam menampung, menggali, menyalurkan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada kepala desa serta tersedianya sistem pelayanan publik online (Quick Response) yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3.	Transparansi tata kelola	Jenis media yang disediakan untuk masyarakat dalam mengakses informasi	Jenis media yang disediakan pemerintah desa kepada masyarakat dalam mengakses informasi berupa media sosial (<i>Facebook</i> dan <i>Whatsapp</i>), media fisik (baliho dan pamflet) dan manual (secara verbal) dengan menghadirkan masyarakat desa dalam suatu acara kegiatan.
		Mekanisme keterbukaan perencanaan program kepada masyarakat	Menghadirkan masyarakat desa dalam seluruh rangkaian kegiatan forum pengambilan keputusan. Masyarakat ikut melihat proses terbentuknya perencanaan program wilayahnya.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Desa Rende memiliki potensi pengembangan *smart government* sebesar 80% yang dihasilkan dari ketercapaian 4 dari jumlah total 5 parameter. Parameter yang tidak tercapai dalam variabel *smart government* di Desa Rende ini ialah ketersediaan pelayanan publik (*online*).

Tia Subekti dan Ratnaningsih Damayanti (2019) berpendapat bahwa *smart government* identik dengan adanya penerapan *e-government* atau pengelolaan pemerintah berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem pemerintahannya. Variabel *smart government* pada Desa Rende menunjukan belum tercapainya seluruh indikator serta pemerintah desa masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan publik dan sosial berbasis *online,* sehingga belum terpenuhinya indikator utama yang menjadi ciri khas *smart government* (*e-government*). Indikator dan parameter yang telah dicapai Desa Rende lebih mengarah pada perkembangan sistem pemerintahan *good governance*. Hal ini dinyatakan dengan merujuk pada indikator *good governance* yang diutarakan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) yakni partisipasi (keterlibatan masyarakat) dan transparansi (memperoleh informasi).

3.2 Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa Rende

Smart community merupakan variabel smart village yang berfokus pada peran masyarakat desa dalam lembaga desa dan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan desa. Melalui smart community diharapkan masyarakat ikut berperan dalam penyelenggaraan dan pembangunan wilayah desa. Berikut merupakan kondisi variabel smart community pada Desa Rende.

Tabel 2. Kondisi Smart Community di Desa Rende

No	Indikator	Parameter	Kondisi Eksisting
1.	Partisipasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa	Partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa berbasis teknologi informasi	Masyarakat desa berpartisipasi dalam memberikan aspirasi dan pendapatnya terkait kondisi serta permasalahan wilayah pada pelaksanaan kegiatan forum pengambilan keputusan dan berpartisipasi dalam pembentukan kelembagaan masyarakat. Namun, partisipasi yang dilakukan belum melibatkan teknologi informasi dan komunikasi atau masih secara manual.
2.	Kelembagaan masyarakat desa	Lembaga atau kelompok masyarakat yang melakukan koordinasi dengan pemerintah	Desa Rende memiliki kelembagaan masyarakat dengan jumlah total 195 orang masyarakat desa yang berpartisipasi dan terbagi kedalam pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Namun, Desa Rende tidak memiliki Lembaga Adat Desa.

Partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Rende memiliki potensi pengembangan *smart community* sebesar 50% yang dihasilkan dari ketercapaian 1 dari jumlah total 2 parameter. Parameter yang tidak tercapai dalam variabel *smart community* di Desa Rende ini ialah partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa berbasis teknologi informasi.

3.3 Pelestarian Nilai Adat dan Budaya, serta Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Desa Rende

Smart environment merupakan variabel smart village yang berfokus pada pelestarian nilai adat dan budaya serta pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan desa. Melalui smart environment ini diharapkan tatanan lingkungan pedesaan dapat berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Berikut merupakan kondisi variabel smart environment pada Desa Rende.

No	Indikator	Parameter	Kondisi Eksisting
1.	Pelestarian nilai adat dan budaya	Pelestarian nilai adat dan budaya berbasis teknologi informasi	Desa Rende memiliki kegiatan adat istiadat dan budaya berupa pencak silat dan paraji pupuhunan yang menjadi daya tarik wisata. Pendokumentasian dan penyebaran kegiatan adat istiadat dan budaya dilakukan melalui media sosial Youtube.
	Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan	Desa Rende memiliki SDA unggulan berupa kegiatan pertanian. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA berupa pemasaran produk pertanian secara langsung dan diolah menjadi makanan tradisional dan makanan lainnya untuk menambah harga jual serta pemasarannya secara manual dan melalui media sosial (Whatsapp Grups).
2.		Pengelolaan sampah lingkungan	Desa Rende belum memiliki tempat pengolahan sampah dan sarana TPS. Masyarakat desa masih melakukan pengelolaan dan pengolahan sampah secara manual dengan cara menimbun dan membakar dan secara individu.
		Pengembangan sumber energi terbarukan	Desa Rende belum memiliki pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan. Namun, memiliki potensi pengembangan energi terbarukan berupa biogas yang dimiliki oleh PT di Desa Rende.

Tabel 3. Kondisi Smart Environment di Desa Rende

Pelestarian nilai adat dan budaya, serta pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan Desa Rende memiliki potensi pengembangan *smart environment* sebesar 50% yang dihasilkan dari ketercapaian 2 dari jumlah total 4 parameter. Parameter yang tidak tercapai dalam variabel *smart environment* di Desa Rende ini ialah pengelolaan sampah lingkungan dan pengembangan sumber energi terbarukan.

3.4 Potensi Pengembangan Konsep Smart Village Pada Desa Rende

Merujuk studi Herdiana (2019) dan Eniyati, Candra, Retnowati, Mulyani, & A.P (2017) yang menjadi dasar dalam melakukan analisis dan wawancara kepada informan menunjukan bahwa *smart village* harus memiliki angka persentase 100% dari ketercapaian seluruh variabel untuk dapat mengembangkan konsep *smart village*. Hasil temuan menunjukan bahwa potensi pengembangan konsep *smart village* tertinggi dan mendekati angka sempurna terdapat pada variabel *smart government* sebesar 80%. Namun, pada kondisi eksisting Desa Rende masih minim menerapkan *e-government* dalam sistem informasi pemerintahan desa dan pelaksanaannya masih dilakukan secara manual serta Pemerintah Desa Rende tidak memiliki fasilitas sistem informasi desa secara *online* yang dapat di akses oleh masyarakat desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan akan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan serta desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa. Sistem informasi desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa untuk mengakses informasi terkait data desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta informasi terkait dengan pembangunan desa. Sistem informasi pembangunan

pedesaan dapat berupa Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan Sistem Informasi Desa (SID) (Badri, 2016). Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sistem yang dapat di akses secara *online* maupun *offline* yang menyajikan RPJMDES atau RKP dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah desa kepada masyarakat secara mudah, cepat dan transparan. Sistem tersebut menyediakan data pembangunan desa, data primer desa seperti profil desa, gambaran umum wilayah, gambaran visual berupa progress dan dokumentasi kegiatan desa, pelayanan administrasi penduduk desa serta sebagai papan informasi kepada publik umum.

Potensi pengembangan konsep *smart village* pada Desa Wisata Rende berupa variabel *smart government* dengan dilakukannya pembangunan dan penyediaan sistem informasi pembangunan pedesaan secara *online*. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai alat dalam mempermudah penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa agar berjalan secara maksimal dan ditujukan untuk memberikan informasi kepada publik guna meningkatkan kualitas layanan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan ini dilakukan dengan pengembangan dan penyediaan sistem informasi desa berupa *updating* data dalam sistem Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) karena belum tersedianya informasi terkait Desa Rende dalam sistem tersebut dan penyediaan Sistem Informasi Desa (SID) secara *online*.

4. KESIMPULAN

Desa Rende memiliki potensi pengembangan variabel *smart government* 80%, *smart community* 50% dan *smart environment* 50%. Seluruh variabel *smart village* pada Desa Rende belum mencapai angka 100% dari ketercapaian seluruh indikator dan parameter untuk dikatakan sebagai *smart village* dan variabel *smart government* lebih mengarah pada ketercapaian indikator dan parameter *good governance* karena parameter utama yang menjadi ciri khas *smart government (e-government)* belum tercapai. Minimnya *penerapan e-government* dalam sistem informasi Pemerintah Desa Rende sehingga perlu adanya pengembangan dan penyediaan sistem informasi desa berupa *updating* data dalam sistem Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan penyediaan Sistem Informasi Desa (SID) secara *online* guna memaksimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Desa Rende kepada masyarakat Desa Rende.

DAFTAR RUJUKAN

- Badri, M. (2016). Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Lampung. *Sistem Komunikasi Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 41-53.
- Eniyati, S., Candra, R., Retnowati, Mulyani, S., & A.P, K. M. (2017). *Perhitungan Tingkat Kesiapan Implementasi Smart City dalam Perspektif Smart Government dengan Metode Fis Madani*, 39-48.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia. *IPTEK KOM*, 1-16.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Indonesia.
- Royyan, J. D. (2019). *Tugas Akhir Studi Kelayakan Desa Wisata Rende.* Bandung: Institut Teknologi Nasional Bandung, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). JPALG Vol. 3 (No.1) (2019): hlm: 18-28. *Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang*, 18-28.